



PERSEPSI POTENSI RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

Sujatmika¹, Sri Kussujaniatun², Anis Siti Hartati³, Budiarto⁴

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Email address : ¹sujatmika@upnyk.ac.id, ²sri.kussujaniatun@upnyk.ac.id,

³anissh_fe@yahoo.com, ⁴budiarto.fp@upnyk.ac.id

Abstract

This Community Service was carried out to determine the perception of the potential for beach tourism levies on local revenue in Bantul Regency. This Community Service uses primary data from interviews with the Regional Government as the manager of tourist attractions and secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Regional Revenue Agency of Bantul Regency as supporting primary data. The method used in this Community Service is a qualitative method regarding the Coastal Tourism Development Strategy. From the results of the analysis that has been carried out, it was found that the potential for Bantul Regional Beach tourism levies is not yet optimal. The perception regarding the potential for beach tourism levies on local original income in Bantul Regency is good, meaning that it is able to increase local original income.

Keywords: Perception, Potential for Beach Tourism Levy, Regional Original Income, Bantul

Abstrak

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui persepsi potensi retribusi pariwisata Pantai terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul. Pengabdian Masyarakat ini menggunakan data primer dari wawancara Pemerintah Daerah selaku pengelola tempat wisata dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul sebagai pendukung data primer. Metode yang digunakan pada Pengabdian Masyarakat ini adalah metode kualitatif mengenai Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa potensi retribusi pariwisata Pantai Daerah Bantul belum optimal. Persepsi mengenai potensi retribusi pariwisata pantai terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul adalah baik, artinya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Persepsi, Potensi Retribusi Pariwisata Pantai, Pendapatan Asli Daerah, Bantul

PENDAHULUAN

Infrastruktur wilayah merupakan salah satu sarana atau alat pemicu adanya perkembangan wilayah. Infrastruktur yang secara langsung dapat menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya ialah jalan. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan jalan yang masuk dalam kategori jalan arteri. Sebagaimana jalan pada umumnya, JJLS sebagai jalan arteri primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan nasional dan atau pusat kegiatan nasional dengan kegiatan wilayah memiliki ketentuan- ketentuan yang mengikat seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Persyaratan teknis jalan secara umum berdasarkan paragraf 2 pasal 12 meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus mengalami perkembangan yang pesat, dengan adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di kawasan pantai Kabupaten Bantul, DIY, perlunya Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata yang merupakan salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut langsung di objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut pengabdian terdorong untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan PbM melibatkan informan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dipilih berdasarkan pandangan pengabdian bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi, antara lain: Kepala Bidang Pariwisata Daerah, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dan Petugas Pemungut Retribusi. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen antara lain, observasi dan dokumentasi.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus mengalami perkembangan yang pesat, dengan adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di kawasan pantai Kabupaten Bantul, DIY, perlunya Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata yang merupakan salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut langsung di objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut pengabdian terdorong untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan PbM melibatkan informan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dipilih berdasarkan pandangan pengabdian bahwa informan tersebut memiliki



pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi, antara lain: Kepala Bidang Pariwisata Daerah, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dan Petugas Pemungut Retribusi. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen antara lain, observasi dan dokumentasi.

1. Kawasan Timur; Parang Tritis dan Pantai Depok , Tarif retribusi = Rp. 9.750,-, biaya asuransi Rp. 250,-, Total = Rp. 10.000,-
2. Kawasan Barat : Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patihan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo, dan Pantai Pandansimo Baru tarif retribusi = Rp. 9.750,- , asuransi Rp. 250,-, total = Rp. 10.000,-

Saat ini Pemerintah tengah mendongkrak sektor pariwisata dengan memprioritaskan pembangunan, dalam perkembangannya dengan adanya program dari pemerintah pusat, terkait dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), bagi kabupaten menjadi peluang dan ancaman. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi memberikan kontribusi yang tinggi. Sehingga menjadi peluang bagi masyarakat Bantul kalau dapat dikelola. Sebaliknya akan menjadi sebuah ancaman bagi Kabupaten Bantul kalau nanti Jembatan Srandakan, yang menghubungkan Kulon Progo Bantul sudah tersambung, maka wisata bebas wira-wira tanpa TPR (Tempat Pemungutan Retribusi, sehingga dengan kondisi ini kalau Kabupaten Bantul tidak segera memetakan TPR, maka akan terjadi "loss PAD" (Pendapatan Asli Pemerintah berkurang. Kegiatan PbM Ini dilaksanakan untuk membantu mendukung pengelolaan retribusi daerah pantai sebagai dampak Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kawasan pantai Bantul, DIY

Person perception adalah suatu proses pembentukan kesan berdasar pengamatan ataupun penalaran terhadap suatu hal, yang mempunyai pengaruh pada aspek psikologi (Harvey dan Smith 3 dalam Ritohardoyo, 2002). Persepsi masyarakat yang terbentuk juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan bendabenda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab

unsur- unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita. (Robbins, 2001).

Pada perkembangannya ilmu geografi selalu ditekankan pada analisisnya sehingga berkembanglah tiga pendekatan utama yaitu pendekatan keruangan (spasial), ekologi (lingkungan) dan kompleks wilayah. Ciri khas dalam pendekatan ini adalah dari perpaduan elemen-elemen geografi yang terpadu. Dalam penelitian ini pendekatan geografi yang digunakan adalah pendekatan ekologis yang mana pendekatan tersebut mengkaji organisme hidup (dalam penelitian ini adalah manusia) dan lingkungannya terutama mengenai persepsi dan sikap dari masyarakat terhadap objek pembangunan di sekitarnya yaitu Jalur Jalan Lintas Selatan.

METODE DAN PELAKSANAAN

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan PbM ini dengan metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Yang terdiri dari 4 tahapan sebagai berikut:

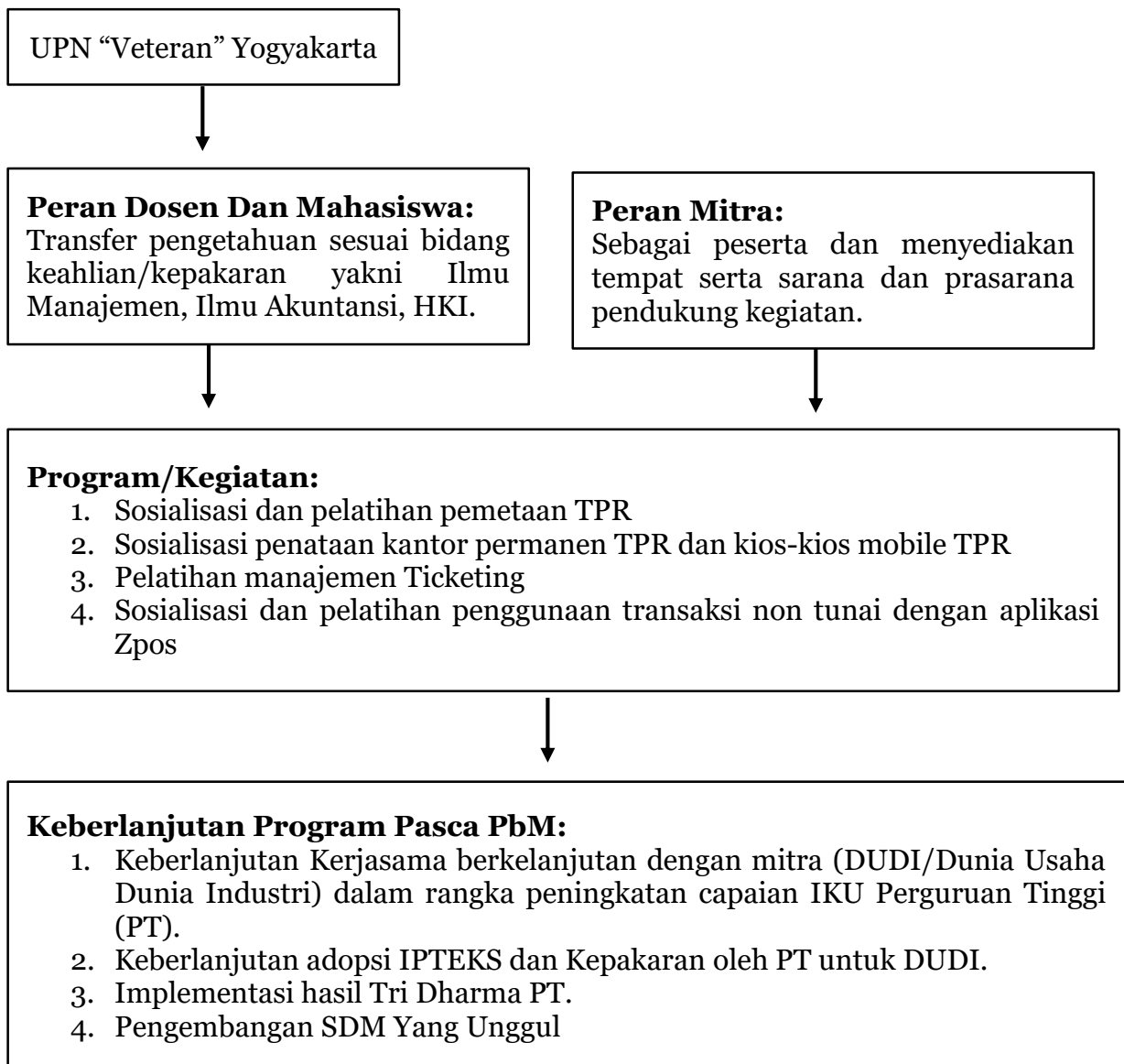
1. Sosialisasi dan pelatihan pemetaan TPR, tahapan sosialisasi dan pelatihan dilatarbelakangi masih belum optimal dalam memetakan TPR di kawasan pantai. Kabupaten Bantul kalau nanti Jembatan Srandakan, yang menghubungkan Kulon Progo-Bantul sudah tersambung, maka wisata bebas wira-wira tanpa TPR (tempat Pemungutan Retribusi, sehingga dengan kondisi ini kalau Kabupaten Bantul tidak segera memetakan TPR, maka akan terjadi "loss PAD" (Pendapatan Asli Pemerintah berkurang. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan TPR
2. Sosialisasi penataan kantor permanen TPR dan kios-kios mobile TPR, tahapan sosialisasi dilatarbelakangi masih belum optimalnya penataan kantor permanen TPR. TPR terdiri one gate, double gate. Karena gedung TPR butuh lahan, sedangkan 100% tanah yang ada merupakan kepemilikan Sultah Ground, sehingga untuk menggunakan lahan tersebut harus seijin Kraton. Kalau lahan belum punya maka dilarang untuk mendirikan kantor pemanen TPR
3. Pelatihan manajemen ticketing, tahap pelatihan ini dilatarbelakangi masih belum optimalnya manajemen ticketing untuk obyek-obyek wisata di kawasan pantai
4. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan transaksi non tunai dengan aplikasi Zpos

Tahapan sosialisidan pelatihan dilatarbelakangi masih masih rendahnya kemampuan dan pemahaman transaksi non tunai dengan aplikasi Zpos (mesin kasir) untuk memudahkan pembayaran retribusi.



Pelaksanaan Kegiatan

Berikut disajikan metode pelaksanaan kegiatan beserta partisipasi mitra serta keberlanjutan kegiatan PbM ini:



Gambar 1. Gambaran rencana pelaksanaan kegiatan PbM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PbM dilaksanakan guna mendukung pengelolaan retribusi pantai sebagai dampak dari Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kawasan pantai Bantul, DIY. Selain itu kegiatan PbM ini juga memberikan pendampingan dalam mendukung usaha dalam manajemen ticketing yang lebih baik pada objek-objek wisata dikawasan pantai serta memberikan kemudahan bagi pengelolaan transaksi non tunai melalui aplikasi Zeepos yang bertujuan dalam mempermudah dalam pembayaran retribusi pada objek-objek wisata kawasan pantai Bantul DIY tersebut. Kegiatan PbM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan pelatihan manajemen ticketing

Manajemen ticketing berperan penting dalam keefektifan pengelolaan pengenaan retribusi wisata kawasan pantai ini. Dengan pengelolaan ticketing yang efektif ini akan mempermudah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan ticketing yang akan menghasilkan peningkatan pada kualitas layanan yang diberikan pada pengenaan retribusi di objek wisata kawasan pantai Bantul DIY ini. Pelatihan dan sosialisasi manajemen ticketing ini dilakukan terhadap pengelola retribusi pada kawasan pantai Bantul DIY dengan wilayah :

- a. Kawasan Timur : Pantai Parangtritis dan Pantai Depok
- b. Kawasan Barat : Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patihan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo, dan Pantai Pandansimo Baru

2. Pendampingan penggunaan transaksi retribusi non tunai

Transaksi non tunai adalah transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai dan digantikan dengan kartu debit, kartu kredit, ataupun alat pembayaran baru yaitu uang elektronik. Adapun instrumen pembayaran nontunai terbaru yakni seperti electronic wallet ataupun aplikasi pembayaran yang berbasis quick response (QR) code. Penggunaan transaksi non tunai ini sudah sangat meluas dikalangan masyarakat, sehingga perlunya transaksi yang digunakan didalam penarikan retribusi pada kawasan wisata pantai Bantul DIY ini juga perlu melakukan penyesuaian dengan memberikan kemudahan transaksi non tunai baik menggunakan QR code, uang elektronik, kartu debit, kartu kredit, atau alat pembayaran non tunai lainnya. Kegiatan PbM ini bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap penggunaan alat pembayaran non tunai pada pengelolaan retribusi pada kawasan pantai Bantul DIY akan memberikan kemudahan bagi proses pembayaran retribusi dimasa yang akan datang.



3. Pendampingan penggunaan Zeepos

Zeepos adalah sistem Point of Sales berbasis Cloud yang dibuat dengan teknologi terdepan untuk membantu mempermudah bisnis. Zeepos dapat digunakan secara offline maupun online. Dengan segala kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, aplikasi penarikan retribusi Android akan menjadi tambahan yang penting dalam menjalankan penarikan retribusi Zeepos mendorong transparansi pemerintahan daerah melalui teknologi informasi dan memberikan inovasi terhadap para pengelola PEMDA sehingga bisa terlaksana layanan tersebut.

Pemerintah Daerah menggunakan Zeepos akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan kemajuan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan public, sebagai contoh penarikan retribusi. Hal ini dilakukan supaya pelayanan dan transparansi pendapatan retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah bisa terdeteksi secara mudah dan akurat, jangan sampai terjadi kebocoran dan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan mengadakan sosialisasi mengenai aplikasi Zeepos ini diharapkan dapat membantu pengelola untuk mampu melakukan pengelolaan retribusi dengan aman, nyaman, dan teratur melalui aplikasi ini dan akan didapatkan transparansi data. Selain itu bagi pengguna diharapkan akan mempermudah seluruh proses transaksi tanpa harus melalui penggunaan pembayaran tunai.

Gambar dan Tabel



Gambar 2. Tampak Depan TPR Kawasan Pantai



Gambar 3. Proses Penarikan Retribusi Kawasan Pantai



Gambar 4. Proses Wawancara dengan Petugas TPR Kawasan Pantai



Tabel 1. Data Pengunjung dan Transaksi Retribusi Kawasan Pantai

DATA KUNJUNGAN BULANAN					DATA KUNJUNGAN 6 BULANAN				
TAHUN 2023					TAHUN 2023				
JANUARI					APRIL				
No	Kawasan	Transaksi Tunai	Transaksi Non Tunai	Total Pengunjung	No	Kawasan	Transaksi Tunai	Transaksi Non Tunai	Total Pengunjung
1	Parangtritis dan Depok	220,628	2,402	223,030	1	Parangtritis dan Depok	197,609	953	198,562
2	Pantai Samas	17,845	772	18,617	2	Pantai Samas	37,972	164	38,136
3	Pantai Goa Cemara	4,300	14	4,314	3	Pantai Goa Cemara	5,630	-	5,630
4	Pantai Kwaru	0	0	0	4	Pantai Kwaru	5,159	2	5,161
5	Pantai Pandansimo	10,500	2	10,502	5	Pantai Pandansimo	19,275	30	19,305
6	Goa Selarong	2,493	10	2,503	6	Goa Selarong	1,567	9	1,576
7	Goa Cerme	1,657	0	1,657	7	Goa Cerme	365	-	365
TOTAL PENGUNJUNG		257,423	3,200	260,623	TOTAL PENGUNJUNG		267,577	1,158	268,735
FEBRUARI					MEI				
No	Kawasan	Transaksi Tunai	Transaksi Non Tunai	Total Pengunjung	No	Kawasan	Transaksi Tunai	Transaksi Non Tunai	Total Pengunjung
1	Parangtritis dan Depok	153,150	1,809	154,959	1	Parangtritis dan Depok	191,225	2,129	193,354
2	Pantai Samas	18,794	276	19,070	2	Pantai Samas	31,100	213	31,313
3	Pantai Goa Cemara	1,958	0	1,958	3	Pantai Goa Cemara	2,972	4	2,976
4	Pantai Kwaru	760	0	760	4	Pantai Kwaru	2,150	7	2,157
5	Pantai Pandansimo	5,215	126	5,341	5	Pantai Pandansimo	10,500	35	10,535
6	Goa Selarong	1,253	0	1,253	6	Goa Selarong	1,850	0	1,850
7	Goa Cerme	251	0	251	7	Goa Cerme	342	2	344
TOTAL PENGUNJUNG		181,381	2,211	183,592	TOTAL PENGUNJUNG		240,139	2,390	242,529
MARET					JUNI (Tgl 1 s/d Tgl 22 Juni)				
No	Kawasan	Transaksi Tunai	Transaksi Non Tunai	Total Pengunjung	No	Kawasan	Transaksi Tunai	Transaksi Non Tunai	Total Pengunjung
1	Parangtritis dan Depok	128,417	1,386	129,803	1	Parangtritis dan Depok	133,717	2,102	135,819
2	Pantai Samas	18,678	256	18,934	2	Pantai Samas	19,200	223	19,423
3	Pantai Goa Cemara	1,143	0	1,143	3	Pantai Goa Cemara	1,380	0	1,380
4	Pantai Kwaru	1,081	0	1,081	4	Pantai Kwaru	1,020	1	1,021
5	Pantai Pandansimo	4,410	27	4,437	5	Pantai Pandansimo	5,760	472	6,232
6	Goa Selarong	1,085	20	1,105	6	Goa Selarong	931	12	943
7	Goa Cerme	282	0	282	7	Goa Cerme	293	0	293
TOTAL PENGUNJUNG		155,096	1,689	156,785	TOTAL PENGUNJUNG		162,301	2,810	165,111

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi daerah kawasan pantai dinilai belum optimal dimulai dari pemetaan TPR di kawasan Pantai, Kabupaten Bantul jika nanti Jembatan Srandakan yang menghubungkan Kulon Progo-Bantul sudah tersambung maka wisata bebas wira-wira tanpa TPR (tempat Pemungutan Retribusi sehingga dengan kondisi ini kalau Kabupaten Bantul tidak segera memetakan TPR, maka akan terjadi "loss PAD"

(Pendapatan Asli Pemerintah berkurang. Belum optimalnya penataan kantor TPR juga menjadi sebuah masalah dikarenakan lahan yang digunakan merupakan lahan milik keraton. Selain itu, kami menemukan bahwa manajemen ticketing yang dilakukan oleh petugas pada obyek-obyek wisata di kawasan pantai juga belum optimal sehingga terdapat kesulitan dalam pengelolaannya. Masih rendahnya kemampuan dan pemahaman transaksi non tunai dengan aplikasi Zeepos (mesin kasir) untuk memudahkan pembayaran retribusi juga mempersulit petugas maupun pengunjung dalam melakukan transaksi selain itu adanya kendala sinyal yang sulit juga menghambat dalam penggunaan aplikasi Zeepos ini sehingga pengunjung lebih memilih untuk menggunakan pembayaran tunai. Dengan permasalahan yang ada, maka kegiatan PbM ini menggunakan metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan retribusi daerah Pantai sebagai dampak Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kawasan Pantai Bantul, DIY.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan retribusi pada Kawasan Pantai ini adalah :

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan pemetaan TPR untuk membantu masyarakat kawasan pantai di area Barat dan Timur dalam upaya pengelolaan retribusi.
2. Melakukan sosialisasi mengenai penataan kantor permanen TPR dan kios-kios mobile TPR untuk mengoptimalkan kantor TPR dengan menggunakan kios-kios TPR
3. Memberikan pelatihan manajemen Ticketing guna memberikan pemahaman manajemen ticketing untuk obyek-obyek wisata di kawasan Pantai :
 - Kawasan Timur; Parang Ticketing retribusi dapat dikelola dengan baik 5 Tritis dan Pantai Depok
 - Kawasan Barat : Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patihan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo, dan Pantai Pandansimo Baru
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan transaksi non tunai dengan aplikasi Zeepos agar wisatawan mampu melaksanakan transaksi non tunai dengan aplikasi Zeepos.
5. Menyediakan pembayaran lain dengan menggunakan metode *e-money/tapcash* guna mempermudah pembayaran untuk menghindari adanya kendala sinyal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia yang telah memberikan dukungan dana untuk pengabdian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi



positif pada pengabdian masyarakat dengan menjelaskan bentuk kontribusi yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, dkk. 2005. Pedoman Survey Cepat Terintegrasi Wilayah Kepesisiran (Rapid Integrated Survey for Coastal Area). Pusat Survey Sumberdaya Laut Bakosurtanal dan PUSPICS Fakultas Geografi UGM : Yogyakarta.
- Jayadinata, Johara T. 2000. Perencanaan Pembangunan Prasarana atau Infrastruktur Pekerjaan Umum di Pedesaan. Menteri Negara Pekerjaan Umum : Forum Komunikasi Pembangunan Pedesaan, Urusan Pedesaan, Bidang Prasarana/ Sarana Kawasan Terbangun.
- Ritohardoyo, Su. 2006. Bahan Ajar Ekologi Manusia. Yogyakarta : Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Robbin, Stephen P. 2001. Organization Theory : Structure, Design and Applications, (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka Benyamin Molan.2006). Jakarta : Prenhallindo.
- Sangarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1987. Metode Penelitian Survai. Yogyakarta : LP3ES. Susantono, Bambang. 2012. Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Jakarta : UI Press. Walgito, Bimo. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta : ANDI

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

